

PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI KEKERASAN BAGI ANAK SEKOLAH DASAR DALAM MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG BAIK

Oleh: Sigit Dwi Kusrahmadi

Abstrak

Kekerasan yang terjadi di Indonesia dari hari ke sehari angkanya semakin meningkat, kekerasan itu terjadi terhadap perempuan, anak-anak, dan kekerasan biasanya lebih banyak dalam rumah tangga (KDRT). Data yang dilansir Komnas Perempuan pasca diundangkan UU-PKDRT tahun 2004 menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu masalah kekerasan terhadap istri (KTI) tahun 2004 mencapai 1.782 kasus, sedang tahun 2005 terdapat 4.889 kasus, dan tahun 2007 mencapai 17.772 kasus dan angka tersebut cenderung meningkat (Kedaulatan Rakyat 29 Nov. 2008; 1).

Dalam peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dimulai tanggal 25 November 2008 sampai dengan 10 Desember 2008, hari AIDS 1 Desember dan hari Hak Azasi Manusia (HAM) jatuh pada tanggal 10 Desember masih terdapat kekerasan masif, dan agaknya bangsa ini perlu meratifikasi kembali pelbagai kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kekerasan virtual juga disuguhkan di layar TV melalui film anak-anak seperti *Naruto*, *Avatar* dan media elektronika melalui komputer, *game onliene* dan tersosialisasi pada anak-anak SD (Sekolah Dasar). Akibatnya anak-anak SD akrab dengan kekerasan dan mengimplementasikan dalam bentuk perilaku yang destruktif. Melalui Pendidikan anti kekerasan diharapkan dapat memberikan secercah harapan agar generasi muda khususnya anak SD menjadi warga negara yang baik, cinta damai mengasihi sesama mengabdikan diri pada anti kekerasan.

Pendahuluan

Perdamaian suatu hal yang sangat mahal, Pasukan Israel pada tanggal 17 Januari 2009, atau Awal tahun 2009 ini menyerang Jalur Gaza untuk menghentikan roke-roket yang diluncurkan kelompok perlawanan Hamas; lebih dari 1000 orang penduduk Gaza meninggal akibat serangan udara Israel, 5000 orang luka-luka atau cedera dan ratusan roket diluncurkan dari Tepi Barat Wilayah Palistina ke tanah (wilayah) Israel. Gencatan senjata pun tidak disetujui lagi alias batal, meskipun Amerika telah memintanya. Perdamaian suatu hal yang langka terjadi, konflik, terjadi kekerasan, kematian, hal ini ada sejak negara itu berdiri. Itulah gambaran dunia yang penuh konflik, kebencian, kemarahan, putus asa, penderitaan, dan kekerasan (Metro TV, 17 Januari 2009).

Secara historis kekerasan sudah ada sejak manusia menghuni planet bumi, kekerasan pertama dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habil karena iri hati, kekerasan terus berlangsung hingga penyaliban, pembunuhan Isa Almasih di awal abad pertama.

Kekerasan terjadi dimana-mana, peperangan antar bangsa; Perang Dunia I, Perang Dunia ke II, Perang Kemerdekaan RI, bahkan sampai awal Abad 21 peperangan dan kekerasan masih berlangsung yang menimbulkan penderitaan dimana-mana, dan terakhir pada peretengahan Maret 2010, terjadi terorisme di Aceh yang menimbulkan korban 3 personal polisi gugur serta 7 teroris meninggal. **Manusia tidak mau belajar sejarah, pada hal sejarah merupakan guru kehidupan,** supaya manusia tidak melakukan kesalahan atau kebodohan yang sama berbuat kekerasan terhadap sesamanya. Oleh karena hingga sampai saat ini masih berlangsung kekerasan seperti di Tailand Selatan, Filipina Selatan, India menghadapi Militan Kasmir, Pakistan menghadapi kelompok dukungan Al Qaida, Pasukan Koalisi Amerika melawan pendukung Sadam di Irak, Afganistan melawan Taliban, Somalia, Dafur (Afrika), Amerika Latin dan konflik antar etnis di Indonesia juga sering terjadi dan merupakan bahaya laten sebagai perwujudan kekerasan. Kejadian kekerasan dalam masyarakat; ketika berlangsungnya Pemilu 2009 terjadi kerusuhan dan kekerasan di Wamena, Papua Barat beberapa Polisi dan penduduk setempat meninggal akibat kekerasan (Metro TV, 17 April 2009).

Kekerasan berlangsung di seluruh dunia, dampak globalisasi dan modernisasi memberi kontribusi terhadap perkembangan kekerasan yang dilakukan manusia. Bahkan perkembangan dari masyarakat nomaden, petani, industri, hingga ke masyarakat zaman revolusi komunikasi telah menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas kekerasan. Adanya perkembangan media cetak, media elektronika, secara tidak langsung telah mempertontonkan budaya kekerasan, pornografi, film-film tidak mendidik seperti fiksi-fiksi; *Power Rangers, Superman, Sin-chan, Avatar, Naruto* telah memberi kontribusi terhadap kekerasan.

Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat bersifat masif, di salah satu kota Kabupaten Kebumen, Jateng terdapat 93 kasus kekerasan; terdiri dari 49 kasus kekerasan terhadap orang dewasa dan 44 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak dilaporkan karena dapat berbuntut panjang, sehingga bagaikan gunung es, yang hanya sebagian terungkap dan sedikit yang dilaporkan. Oleh karena itu untuk mengatasinya Pemerintah Indonesia telah membentuk Tim Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PKKPA) dan Tim terpadu (Kedaulatan Rakyat, 18 April 2008: 18).

Kekerasan sepertinya sudah mendarah daging, khususnya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sebagaimana dalam penerimaan siswa baru anak-anak SMP diperlakukan dengan tidak manusiawi disertai kekerasan berupa bentakan dan cacian oleh seniornya. Sebagai senior, yang disebut sebagai Komite Disiplin membentak juniornya, menyeret dari dalam kelas, meyuruh *pus up*, menggebrak pintu dan jendela sembari membentak – bentak orang disekitarnya (Google, Anti Kekerasan, 2009). Kekerasan merupakan gambaran dalam pendidikan pada umumnya, baik dilakukan oleh siswa senior terhadap junior dan guru terhadap muridnya, sehingga lengkaplah kekerasan yang masif.

Kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan banyak guru menganggap hal yang wajar, pada hal mereka seharusnya tahu bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan tidak ada manfaatnya, bahkan justru menambah penderitaan bagi peserta didik. Guru pernah menjadi siswa dan pernah diperlakukan secara keras sewaktu di bangku sekolah, sehingga merupakan pengulangan yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Beberapa guru telah melakukan kekerasan terhadap siswanya dengan memarahi melampaui ambang batas, sehingga sangat mempengaruhi secara psikologis terhadap peserta didik.

Kekerasan-kekerasan dalam dunia pendidikan seolah-olah menjadi hal biasa; di Sumatra Utara seorang guru oleh raga mengadu murid-murid SD agar berkelahi dengan alasan yang tidak jelas, seorang guru olahraga SMA Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadu muridnya di Lapangan *Basket Ball*, dan perkelahian yang direkam dengan kamera *hand phone* kemudian disebar luaskan, suatu hal yang biasa terjadi dalam masyarakat. Perkelahian remaja putri hampir disetiap propensi menjadi *trend*, tidak kalah dengan perkelahian antar pelajar putra. Hal ini menandakan bahwa masyarakat kita sedang sakit karena tekanan-tekanan ekonomi dan masalah-masalah yang kompleks sehingga masyarakat mengalami gangguan jiwa (Sandra, TV 7, Senin 6 April 2009)

Pengertian Kekerasan

Secara umum pengertian kekerasan didefinisikan suatu tindakan yang dilakukan suatu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Kekerasan Anak adalah kekerasan terhadap individu yang belum dewasa, termasuk yang ada di dalam kandungan ibunya. Perlakuan tindakan semena-mena terhadap anak biasanya dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga atau melindungi anak (*care*

taker) pada seorang anak. Kekerasan biasanya dilakukan pada anak baik secara fisik, mental, seksual atau emosi. Pelaku kekerasan pada umumnya bertindak sebagai pelindung, yang seharusnya memproteksi terhadap kehidupan anak, dan kekerasan dilakukan oleh orang terdekat. Biasanya dilakukan oleh ibu kandung, bapak kandung, bapak tiri, ibu tiri, kakek, nenek, paman, tante, supir pribadi, pembantu, tukang ojek, tukang kebun, kakak kelas (Yayan Akkhyar, 2008: 1).

Kekerasan menurut Simon Fisher yang dikutip Neneng (2008; 1) "kekerasan adalah tindakan, perkataan, sikap berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, sosial, atau lingkungan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensi secara penuh." Saat ini kekerasan dalam kehidupan sehari-hari hampir diidentikkan dengan perkelahian, benturan fisik. Kekerasan bukan hanya berwujud perkelahian atau benturan fisik tetapi bisa diwujudkan dalam perkataan, tindakan, sikap manusia dapat dikategorikan kekerasan.

Menurut Iqbal Djayadi, Sosolog UI yang dikutip Sumarsih (2008; 3) "Kekerasan secara umum dapat merujuk kepada tindakan untuk mengurangi atau meniadakan eksistensi manusia lain. Ada dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individual dan berorientasi sepenuhnya pada individu, dan secara umum jenis ini merujuk pada kriminalitas. Tercakup di dalamnya tindakan penganiayaan dan pembunuhan, baik dilakukan untuk mengambil harta maupun nyawa orang lain. Kedua adalah kekerasan yang dilakukan secara kolektif, baik pelaku maupun orientasi hasilnya adalah kelompok bukan individu.

Kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan diterjemahkan tindakan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau kerusakan fisik. Kekerasan adalah sebagai upaya seseorang atau kelompok untuk meniadakan atau menguasai kelompok lain terhadap seluruh hidupnya, dilakukan bertentangan dengan nilai moral dan norma hukum. Akibat tindakan kekerasan adalah seseorang atau kelompok, bisa kehilangan nyawa, harta, kesusakan fisik (terluka dan cedera) atau kehilangan semuanya.

Kekerasan anak adalah kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang lebih muda, dengan memanfaatkan kekuasaannya atau otoritasnya. Biasanya anak ada dibawah kekuasaannya dan kekerasan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik,

kesengsaraan, cacat seumur hidup, penganiayaan seksual, maupun penganiayaan emosional. Pada tahun 1998 di Amerika Serikat terdapat 1100 anak meninggal. Atau rata-rata 3 orang anak meninggal setiap hari akibat kekerasan; dari 2,8 juta kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada Agensi Perlindungan anak. Berdasarkan bentuk kekerasannya; 53,5% kasus kekerasan akibat anak yang diterlantarkan, 22,7% kasus akibat kekerasan fisik, 11,5% akibat kekerasan seksual, 6% akibat kekerasan emosi, dan 6% akibat penelantaran medis (Google, Kekerasan, 2008).

Pelanggaran Hak anak dalam bentuk kekerasan di Indonesia juga angkanya cukup tinggi, catatan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, kualitasnya mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2008 pelanggaran hak anak berjumlah 26.901.627 kasus, terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan mempekerjakan anak di bawah umur. Tahun 2008 kualitas pelanggaran hak anak terpantau semakin menguatirkan dan sangat kompleks (Seto Mulyadi, 2008: 3). Dalam kekerasan terhadap anak pelakunya sangat beragam, bahkan mengakibatkan kematian seperti aborsi. Pelaku biasanya membuang hasil aborsi ke tempat sampah, menenggelamkan ke dalam sungai dengan memberi pemberat batu. Kekerasan terhadap anak dengan meracuni dilakukan dengan alasan karena himpitan ekonomi.

Kekerasan dalam **bidang pendidikan**, biasanya dilakukan dalam penerimaan siswa baru, atau mahasiswa baru. Dalam penerimaan siswa baru dikenal dengan Ospek (Orientasi pengenalan lingkungan sekolah), MOS (masa orientasi siswa) atau dengan istilah semacam itu. MOS biasanya disertai dengan bentakan, pelecehan, penganiayaan senior terhadap junior. Penganiayaan Siswi Senior terhadap siswi junior juga terjadi di SMU Tulung Agung (Jatim), Siswi Pati (Jateng), bahkan penganiayaan bisa mengakibatkan kematian seperti yang terjadi di STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) maupun perguruan tinggi semi militer. Alasan dalam kekerasan ini adalah sebagai ajang balas dendam terhadap juniornya sebagai tradisi tahun sebelumnya, alasan lainpun dibuat untuk membenaran antara lain; menjalin kebersamaan, memupuk persaudaraan, kedisiplinan. Namun semua itu tidak ada korelasi antara tujuan dengan kejadian di lapangan.

Komnas Perlindungan Anak (PA) juga memperhatikan ada intensifitas peningkatan kekerasan di dunia pendidikan, baik yang dilakukan tenaga pendidik

terhadap muridnya, maupun kekerasan yang dilakukan senior terhadap juniornya pada tahun 2008. Kenaikan peningkatan diprediksi akan semakin meningkat baik tidak dilaporkan maupun dilaporkan, yang terpantau Komnas PA akibat krisis ekonomi (Seto Mulyadi, 2008: 3).

Kekerasan berbau **SARA** (suku antar golongan ras dan agama) juga terjadi di berbagai tempat seperti di Kalimantan kasus Sanggoledo, DOM (daerah operasi militer) Aceh, Papua dalam bentuk Organisasi Papua Merdeka, anti Jawa di Sulawesi. Sedangkan kasus **kekerasan agama** dilakukan terhadap aliran Ahmadiyah, Aliran kepercayaan, kekerasan terhadap Umat Kristiani seperti kasus Ambon, Poso dan Tanten, Situbondo, Mataram Lombok, Rengasdengklok, bom terhadap gereja di Semarang, dan banyak tempat ibadah dirusak dan dibakar. Menurut Gus Dur kekerasan agama akan selalu terjadi di Indonesia, selama warga negara Indonesia tidak mengakui adanya pluralisme dalam suku dan agama. Ada kelompok tertentu menganggap dirinya paling benar dan melakukan kekerasan terhadap agama yang dianggap sesat. Kelompok Agama pelaku kekerasan, mereka tidak menyadari bahwa Bangsa Indonesia sudah berabad-abad yang lalu memiliki keragaman dalam agama yang dikenal dengan Bhineka Tunggal Ika; berbeda-beda tetapi tetap satu jua (Gus Dur, 2008: 3).

Menurut Magnis Suseno; kekerasan dalam agama dapat diminimalisir jika seluruh warga bangsa, menghargai sikap pluralisme dalam agama yang merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sikap tersebut bukan impor dari luar tetapi merupakan kearifan bangsa yang sudah ada sejak dahulu. Magnis menyayangkan ada kelompok tertentu yang tidak setuju tentang konsep pluralisme dalam agama sehingga menimbulkan kekerasan dalam agama. Pada hal Sumpah Pemuda, Proklamasi mengandung nilai-nilai keberagaman dalam persatuan bangsa dan tidak menghendaki kekerasan agama karena negara melindungi segenap warganya.

Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah Dasar (SD)

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogi*, dalam bahasa Yunani *pae* artinya anak dan *ego* artinya aku membimbing. Secara harafiah pendidikan berarti aku membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi dewasa. Secara singkat Driyarkara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan bahwa

pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses pematangan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis (Istiqomah, 203: 7). Sedang hakekat Anti Kekerasan adalah mensosialisasikan nilai-nilai, norma-norma tingkah laku manusia yang harus dan wajib dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang mengedepan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian dan menghindari kekerasan.

Dalam mensosialisasikan nilai moral perlu adanya komitmen para elit politik, tokoh masyarakat, guru, *stakeholders* pendidikan Anti kekerasan, dan seluruh masyarakat. Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:

“Pendidikan Anti kekerasan adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komperhensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Pelatihan pendidikan anti kekerasan perlu diadakan bagi kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang merupakan esensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang terlibat dalam proses kehidupan yang utuh. Perhatian pendidikan anti kekerasan harus berlangsung cukup lama, dan pembelajaran anti kekerasan harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat (Setyo Raharjo, 2002; 28).

Pendidikan Anti kekerasan harus direncanakan secara matang oleh *stakeholders* , sebagai *think-tank*, baik para pakar Anti kekerasan (Komnas HAM Anak) seperti rohaniawan (tokoh agama), pemimpin non formal (tokoh masyarakat), kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid. Pendidikan anti kekerasan ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan uiniversal. Keberhasilan pendidikan anti kekerasan dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan kompetensi sosial yang moralis (anti kekerasan) dan dinamis sehingga menghasilkan warga negara yang baik (*good citizen*). Kesuksesan pendidikan Anti kekerasan tidak diukur dengan penguasaan nilai-nilai anti diskriminasi dan inklusifisme serta *soft skills* yaitu kemampuan bekerja kelompok secara **inklusif** (mudah menerima masukan) anti diskriminasi, egalitarian, memimpin secara demokratis, kemampuan berkoordinasi,

humanis, menghargai pluralisme, kemampuan berkomunikasi, tabah dan gigih, percaya diri, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi, tidak banyak tuntutan dan memiliki nilai-nilai wawasan perdamaian untuk mewujudkan kehidupan anti kekerasan (Sofian, Kedaulatan Rakyat, 19 Agustus 2005). Nilai-nilai Anti kekerasan harus senantiasa dijunjung tinggi seperti konsep “*tepa sliro*” berimpati kepada orang lain yang menekankan kebersamaan dan keteladanan pemimpin dalam kehidupan anti kekerasan.

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan pemimpin formal dan non formal bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang penuh perdamaian dan kasih sayang terhadap sesama yang diwujudkan baik dalam ranah organisasi negara (*state*), organisasi masyarakat (*civil state*), ranah istitusi dunia usaha (*market institution*). Semua pejabat negara, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab menjadikan jabatannya sebagai media pembelajaran pendidikan Anti kekerasan

Dalam mewujudkan kehidupan anti kekerasan untuk mewujudkan masyarakat sipil perlu strategi perjuangan secara struktural dan kultural secara bersama-sama. Strategi struktural dalam arti politik, perbaikan struktural ini merupakan sarana yang paling efektif adalah melalui partai politik. Melalui lembaga partai politik aspirasi masyarakat dapat disalurkan tentang pendidikan anti kekerasan akan diperjuangkan sebagai masukan dari infrastruktur politik kepada suprastuktur politik. Input dari infrastruktur politik kepada suprastruktur politik akan dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan atau undang-undang yang mewajibkan dilaksanakannya pendidikan Anti Kekerasan bagi generasi penerus yang didukung dana dari pemerintah. Sementara secara kultural memerlukan perjuangan yang panjang. Perjuangan membangun mentalitas bangsa melalui nilai-nilai keadilan demokrasi dan mengandung nilai anti kekerasan, harus diawali dari individu yang mengutamakan kehidupan yang menjunjung nilai-nilai anti kekerasan, disemaikan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat luas sebagai implementasi keteladanan anti kekerasan.

Dalam mensosialisasikan nilai-nilai Anti kekerasan diperlukan pemimpin atau pendekar, pejuang Anti kekerasan yang tidak pernah gentar, putus asa atau frustrasi meskipun rintangan, halangan, lingkungan tidak kondusif, dan harus berhadapan dengan kekuasaan yang cenderung menggunakan kekerasan. Dengan tidak jemu-jemu

meneriakan sosialisasi pendidikan Anti kekerasan untuk mewujudkan nilai anti kekerasan secara universal.

Pendekar moral anti kekerasan *pertama*; **harus yakin sungguh-sungguh yakin atau seyakini-yakinnya (percaya sungguh-sungguh percaya)** bahwa nilai-nilai anti kekerasan **bisa dan harus disosialisasikan** dengan sungguh-sungguh pada peserta didik sehingga peserta didik mengerti dan melaksanakan nilai-nilai anti kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*; pemimpin (pendekar anti kekerasan) harus berfikir **sungguh-sungguh berfikir** tidak pernah putus asa dan kehilangan akal untuk mencari solusi dalam pendidikan anti kekerasan demi perbaikan moral peserta didik. *Ketiga*; pendekar anti kekerasan **harus berusaha sungguh berusaha** untuk mewujudkan **kehidupan anti kekerasan yang baik** dalam masyarakat. Pemimpin anti kekerasan harus bersedia bersinergis dengan pemimpin lain untuk mewujudkan kehidupan yang damai, baik dengan menggunakan konsep *gold three angle* yaitu kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah dan penyandang dana. Perguruan tinggi mengadakan R dan D (*research & development*) dalam bidang pendidikan anti kekerasan yang telah diujicobakan dan berhasil. Pemerintah termasuk pemimpin nasional yang memberi *good will* (kemudahan) melalui peraturan pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan. Penyandang dana bisa dari *grand* (hadiah) atau donatur, hibah untuk mendanai riset dan sosialisasi nilai anti kekerasan sehingga pendidikan anti kekerasan bisa berjalan dengan baik seperti harapan.

Hasil riset perguruan tinggi diharapkan menambah alternatif pemerintah yang dapat dipilih sebelum menentukan kebijakan dilaksanakan, selain itu tenaga dosen bersama mahasiswa dapat mendampingi masyarakat, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa khususnya dalam memecahkan **persoalan kekerasan dalam kehidupan berbangsa**. Mereka bisa bersinergis dan tidak saling menyalahkan, pakar-pakar perguruan tinggi dapat memberi masukan pada pemerintah dan sekaligus terjun langsung ke masyarakat dengan langkah kongkrit untuk memperbaiki kehidupan bangsa dalam mewujudkan anti kekerasan (Victor Purba, Kompas; Kamis, 22 Maret 2007; 12).

Jadi nilai anti kekerasan harus dibawa seorang pakar anti kekerasan yang meyakini kebenaran perdamaian sebagai ideologi ideal harus ditanamkan pada setiap

hati (personal, individu) agar suatu hari nanti kehidupan bangsa yang anti kekerasan pasti terwujud.

Dengan adanya benih nilai-nilai anti kekerasan yang sudah disemaikan dalam keluarga, diajarkan di sekolah oleh guru dan masyarakat diharapkan setiap personal dapat mempraktikkan nilai perdamaian (anti kekerasan), kasih terhadap sesama dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Modal nilai perdamaian dan kasih yang sudah ada dalam personal merupakan lahan yang subur bagi generasi penerus untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*). Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan perdamaian (anti kekerasan) dapat dimanfaatkan konsep *learning to do, learning to be, learning to know, learning to live together*. Pengertiannya dalam pembelajaran anti kekerasan peserta didik diajak melakukan bersama-sama, pendidikan merupakan proses menjadi dewasa, sempurna sesuai dengan tujuannya, pendidikan anti kekerasan dilaksanakan saat ini, dan pendidikan anti kekerasan dilakukan bersama-sama dalam kehidupan masyarakat sehingga pendidikan antara di sekolah, rumah dan masyarakat saling mendukung untuk membentuk kehidupan yang lebih damai (anti kekerasan). Apalagi guru, orang tua murid, pemuka agama, pemuka masyarakat, elit politik, dan pejabat (pemimpin nasional) memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dengan konsep “*Ingarso sung tuladho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*” artinya seorang pemimpin yang baik bisa memberi keteladanan atau menjadi panutan bagi yang dipimpinnya, ditengah-tengah lingkungannya menjadi penggerak untuk mencapai tujuan, sedang jika dibelakang memberi dorongan, petunjuk atau memberi motivasi bagi yang dipimpinnya sehingga sasarannya dapat dicapai. Konsep pendidikan anti kekerasan di atas tidak hanya sebagai wacana tetapi harus diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata, sehingga pendidikan anti kekerasan bisa mewujudkan masyarakat sipil yang dicita-citakan.

Pendidikan Anti Kekerasan Anak Usia Sekolah Dasar (SD)

Usia sekolah dasar (sekitar umur 6,00 – 12,00 tahun), ini merupakan tahapan penting bagi perkembangan seorang peserta didik, bahkan suatu hal yang fundamental bagi kesuksesan perkembangan pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu seorang guru tidak boleh mengabaikan kehadiran anak usia sekolah dasar, demi kepentingan di masa

depan bagi generasi penerus. Seorang guru dituntut untuk memahami karakteristik peserta didik, arti pentingnya belajar bagi peserta didik, tujuan belajar bagi peserta didik, dan kegiatan belajar bagi anak SD, termasuk di dalamnya guru harus menguasai psikologi pendidikan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (Sri Rumini, 1995: 15). Bagi seorang guru harus mengetahui perkembangan dan karakteristik peserta didik yang meliputi:

- “1. Mereka (anak usia SD) secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang mengelilingi mereka sendiri.
2. Anak usia sekolah dasar senang bermain dan lebih suka bergembira
3. Anak SD suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi sesuatu situasi dan mencobakan hal-hal yang baru.
4. Anak SD bisa tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi sebagaimana mereka mengalami ketidakpuasan dan menolak kegagalan-kegagalan.
5. Mereka (anak usia SD) belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang terjadi.
6. Anak SD belajar dengan cara bekerja, mengobserasi, berinisiatif dan mengajar anak-anak lainnya” (Mulyani Sumantri, 199: 17).

Menurut Slamet Suyanto mengatakan bahwa pendidikan SD merupakan ilmu yang bersifat interdisipiner, meliputi; Pendidikan anak khusus usia 6-12 tahun, Psikologi perkembangan anak, Biologi perkembangan, *Neoroscience*, Pendidikan jasmani, Pendidikan bahasa dan seni, dan pendidikan bidang studi termasuk pendidikan moral (Slamet Suyanto, 2006: 1). Sedang prinsip-prinsip dalam proses belajar mengajar antara lain; *Appropriate* yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan tumbuh kembang jiwa anak, esensi bermain, holistik atau menyeluruh, terpadu atau *integrated*, bermakna, *long life skills* dan fleksibel

Anak sekolah dasar mengalami perkembangan fisik dan motorik, tak kecuali perkembangan kepribadian, watak, emosional, intelektual, bahasa, budi pekerti, dan moralnya yang bertumbuh dengan pesat. Oleh karena itu jika menghendaki bangsa yang cerdas, dan bermoral baik, pendidikan **anti kekerasan** harus dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia SD.

Keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan moral di China patut kita tiru. Pendidikan moral usia anak SD di China berbeda dengan pendidikan di Indonesia yang lebih menekankan pada karakter akhlak (**implementasi anti kekerasan**) melalui proses *knowing the good, loving the good, and acting the good*, yaitu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan aspek fisik, sehingga menghasilkan akhlak mulia (moral yang baik anti kekerasan) bisa terukir menjadi *habit of the mind, habit of the hart, habit of the hands* (Google Pendidikan Anti Kekerasan , 2007: 1). Pendidikan anti kekerasan memerlukan keterlibatan semua aspek kehidupan manusia, sehingga tidak cocok hanya menekankan pada aspek kognitif saja, hal ini dapat membunuh karakter anak. Namun pendidikan anti kekerasan bagi anak SD harus disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak, mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia; intelektual, karakter, estetika, dan fisik dan dalam koridor pembelajaran Anti kekerasan yang menyenangkan (Bobbi DePorter & Mike Hernacki, 2003: 8).

Dalam usaha mentransfer nilai-nilai anti kekerasan dapat digunakan **pendekatan dan metode** pembelajaran yang tepat sesuai dengan tumbuh kembang jiwa anak. Menurut Habibah (Habibah, 2007: 1) dalam sosialisasi pendidikan anti kekerasan dapat digunakan pendekatan **indoktrinasi, klasifikasi nilai, keteladanan, dan perilaku guru**. Keempat pendekatan tersebut di atas diharapkan dapat diterapkan sesuai dengan situasi kondisi serta dilakukan secara holistik sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Pendekatan di atas juga diharapkan guru mengetahui karakteristik siswa maupun kondisi kelas, dan seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan psikologi pendidikan sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran Anti kekerasan.

Pendekatan indoktrinasi dengan cara memberi hadiah atau hukuman, peringatan, dan pengendalian fisik. Sedang pendekatan klasifikasi nilai, dengan cara penalaran dan ketrampilan. Pendekatan keteladanan dengan cara disiplin, tanggung jawab, empati, dan pendekatan pembiasaan dengan cara perilaku seperti berdoa, berterima kasih, mengasihi sesama. Pendekatan habitus diharapkan dapat merubah perilaku Anti kekerasan (Ambarwati, 2007: 1).

Penutup

Kekerasan terjadi disebabkan karena lingkungan yang tidak kondusif, sehingga menimbulkan *depresi*, *stress* yang berat sehingga ada kecenderungan melakukan tindakan tidak terkontrol dan dapat melakukan kekerasan terhadap orang lain maupun diri sendiri; contoh kongkrit para caleg yang gagal melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dan orang lain. Faktor penyebab *stress* sangat kompleks, dari masalah ekonomi, harapan yang tidak terwujud, lingkungan yang keras dan kompetitif, kurangnya nilai agama yang diimplementasikan dalam hidup.

Sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan harus diberikan kepada anak SD, karena anak SD sebagai generasi penerus kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Pendidikan anti kekerasan bisa disosialisasikan melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, dan akan lebih efektif lagi jika melalui peraturan formal, dan para guru wajib mengintegrasikan dalam mata pelajaran sekaligus memberi keteladanan anti kekerasan. Pemerintah sebagai lembaga formal juga wajib menyensor tayangkan TV yang menampilkan gambar-bambar atau cerita yang mengakomodasikan kekerasan.

Pendidikan Anti kekerasan diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik (*good care* atau *good citizen*) dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap positif untuk menegakkan norma-norma sosial anti kekerasan, membuat aturan hukum yang kondusif untuk kebaikan dan nilai-nilai moral anti kekerasan demi masa depan bangsa yang mengedepankan nilai-nilai anti kekerasan, anti diskriminasi, inklusifisme, humanisme, pluralisme, kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan, kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi dan demokratisasi yang bersumber pada nilai anti kekerasan sebagai paradigmanya..

Diberikannya pendidikan Anti kekerasan pada anak SD merupakan salah satu alternatif solusi penyelesaian untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dalam masyarakat Indonesia. Dengan tersosialisasikan pendidikan anti kekerasan diharapkan generasi penerus dapat memahami, menganalisis, menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang berhubungan dengan kekerasan dan dapat membangun kehidupan anti kekerasan secara berkesinambungan, konsisten yang bersumber pada nilai-nilai moral Pancasila sehingga cita-cita bangsa dapat terwujud perdamaian abadi anti kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mallarangeng, 2000. *Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Forum Komunikasi Keluarga Rokan Hulu.
- Bobbi DePorter & Mike Hernacki, 2003. Pembelajaran yang menyenangkan. Jakarta. Gramedia.
- Budi Istanto, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Generasi Penerus*. Yogyakarta: FIP. UNY.
- Eomi Toufiqoh, 2007. *Pentingnya Pendidikan Moral*, Yogyakarta: FBS, UNY.
- Ignas Kleden. 2003: Demokrasi “Demokrasi dan Distorsinya: Politik Reformasi di Indonesia”. *Google*.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Fakultas Filsafat UGM.
- LAI, 2003, *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Seputar Indonesia, *Pelanggaran Hak Anak Meningkat* , Senin 29 Desember 2008.
- Slamet Suyanto, 2006. Pendidikan Anak SD.
- Umar Said, 2007. *Google Pendidikan Moral*
- Verkulyl. J. 1985. Etika Kristen, Jakarta. BPK.

Sumber Televisi

- Metro TV, 17 Januari 2009.
- Sandra, TV 7, Senin 6 April 2000, Tentang Kekerasan dalam Kehidupan Masyarakat.
- Seputar Indonesia, *Pelanggaran Hak Anak Meningkat* , Senin 29 Desember 2008

Surat Kabar

- A. Safei Maarif, Kompas, 7 Maret 2007.
- Haedhar Nashir, ”Leptop Dewan”. *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 23 Maret 2007.
- Kedaulatan Rakyat* 29 Nov. 2008.
- Kedaulatan Rakyat*, 18 April 2008.
- Sofian, *Kedaulatan Rakyat*, 19 Agustus 2005.
- Victor Purba, ”UI Siap Melangkah Lebih Kongkrit”, *Kompas*, Jakarta, 23 Maret 2007.

Internet

- Ambarwati, 2007. Kekerasan
- Google, Anti Kekerasan, 2009
- Yayan Akkhyar, Anti Kekerasan. 2008.
- Neneng. Anti Kekerasan. 2009.
- Seto Mulyadi, Anti Kekerasan terhadap Anak. 2008
- Sumarsih. Kekerasan. 2008.

Biodata Penulis:

Sigit Dwi Kusrahmadi, lahir di Yogyakarta, 27 Juni 1957, menyelesaikan S-1 di Fakultas Sastra Jurusan Sejarah UGM, dan menyelesaikan S-2 Sospol Ketahanan Nasional UGM. Sejak tahun 1987 mengajar di MKU dan tahun 2003 pindah di D-2 PGSD FIP UNY.